

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini dunia bisnis telah mengalami persaingan yang ketat. Negara-negara berkembang dituntut untuk menerapkan sistem baru dan lebih baik dalam pengelolaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sering disebut *Good Corporate Governance* (Rahmita Wulandari, 2013). Maraknya skandal dan kecurangan laporan keuangan terkait manipulasi pada perusahaan yang sudah *go public*. Diyakini karena kegagalan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang kurang baik.

Menurut Daniri (2014) selama sepuluh tahun terakhir ini, konsep *Good Corporate Governance* (GCG) ditempatkan di posisi strategis yang terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis terutama untuk perusahaan yang mampu berkembang sehingga menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG, diperburuk dengan sistem hukum dan praktek perbankan yang lemah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, penerapan *good corporate governance* secara konsisten dan komprehensif mutlak dibutuhkan untuk suatu sistem pelaporan keuangan yang akurat dan transparan, yang dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan menguasai standar global sesuai bidangnya. Dari berbagai penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama disebabkan oleh kenyataan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum menjadikan *corporate governance* sebagai *corporate culture*. Penelitian yang dilakukan oleh konsultan manajemen Mckinsey & Co.,

menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tercatat di pasar modal (sebelum krisis) ternyata *overvalued*. Ditemukan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik ditentukan oleh *Growth Expectation* dan sisanya 10% baru ditemukan oleh *Current Earning Stream*, yang merupakan kinerja sebenarnya dari korporasi (Daniri, 2014;168). Jadi, kenyataannya terdeteksi sebuah permainan “kecurangan” di pasar modal yang dilakukan atau diatur oleh pihak tertentu yang mengalami keuntungan atas peristiwa tersebut.

Sidharta Utama mengakui dalam hal praktek GCG, Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia lainnya. Karena itu diperlukan lingkungan *public governance* yang kondusif agar praktik GCG dapat dijalankan secara efektif (Majalah Akuntan, Indonesia 2013). Memang jika dilihat untuk jangka pendek, seakan hal itu merugikan bagi perusahaan yang menerapkan GCG karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam konsep ini. Pertama, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan. Kedua, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya (Sutedi, 2011).

Dalam penerapannya, *Good Corporate Governance* memiliki lima aspek utama yang harus dilaksanakan yaitu *transparency* (keterbukaan informasi yang relevan), *accountability* (pertanggungjawaban kinerja), *responsibility* (tanggung jawab masyarakat, lingkungan dan pemerintah), *independency* (tidak ada saling mendominasi dan intervensi), dan *fairness* (kewajiban dan kesetaraan). Kelima komponen tersebut sangat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan jika diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghalang timbulnya aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak relevan dan *reliable* (Octavia, Bisnis, Manajemen, Petra, & Siwalankerto, 2014).

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba di laporan keuangan dengan maksud tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi perusahaan. Manajemen laba terjadi ketika manajer *judgement* dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan (Sherly, 2014). Sehingga para *stakeholder* tertipu dengan informasi kinerja ekonomi perusahaan saat ini.

Menurut Sulistyanto, rekayasa ini merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan dengan mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Tujuan utama manajemen melakukan manajemen laba adalah untuk mengelabui pemakai laporan keuangan sehingga manajemen mendapatkan keuntungan pribadi (*obtaining private gains*). Manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk mempercantik laporan keuangan dengan mempermainkan dan mengutak-atik angka-angka dalam laporan keuangan agar terlihat lebih cantik serta memaksimalkan kesejahteraan manajer (Sulistyanto, 2008).

Tindakan *earnings management* telah memunculkan beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan ternama di dunia, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan secara luas diketahui antara lain : Polly Peck, BBCL, Wordcom di Amerika Serikat, HIH, Enron dan One-tel di Australia. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Octavia *et al.*, 2014) dan kasus terbaru PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan dugaan memanipulasi laporan keuangan PT Tiga Pilar pada tahun 2017. Secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards (Daniri, 2014;60).

Dari beberapa contoh kasus diatas, sangat relevan bila penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisisensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen

perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (Ujiyantho & Agus Pramuka, 2007) karena sistem *good corporate governance* juga memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor dalam membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat (Nasution & Setiawan, 2007).

Hubungan antara manajemen dan pemilik dapat dijelaskan dengan teori agensi. Yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang telah mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha. Manajemen memiliki keleluasaan untuk mengoptimalkan laba sehingga ia akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Terdapat dua kepentingan berbeda dengan tujuan yang sama untuk mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Kondisi ini terjadi karena asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dana akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Sutedi 2011;3). Ketidakselarasan kepentingan antara dua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan GCG merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Mekanisme *good corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan diantaranya adalah komisaris independen dan komite audit (Nasution & Setiawan, 2007).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Clarisa dan Taco (2016) menunjukkan dewan direksi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Sedangkan *earning power*, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun hasil penelitian Ajeng dan Agus (2015) mengenai *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba justru menghasilkan bahwa mekanisme GCG tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian mengenai PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, REPUTASI KAP, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2020) yang dilakukan Kristin dan Abdonsius (2016) menunjukkan

bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang sudah disebutkan diatas, terdapat adanya perbedaan hasil yang didapatkan dari para peneliti yang berbeda, sehingga pemilihan variabel yang dipilih dikarenakan adanya ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Viola Syukrina E Janrosl dan Joyce Lim (2016), dengan mengganti objek penelitian perusahaan sektor keuangan (perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berusaha menyelidiki adanya praktik manajemen laba serta menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, reputasi KAP, komite audit, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberikan judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, REPUTASI KAP, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2020)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?
- 2) Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?
- 3) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?

- 4) Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?
- 5) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Manajemen Laba Pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?
- 2) Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?
- 3) Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?
- 4) Untuk mengetahui apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?
- 5) Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan peran *good corporate governance* dalam mengurangi manajemen laba.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat sebagai masukan sekaligus acuan dalam menerapkan *good corporate governance* dan mencermati pelaksanaan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas sehingga dapat mengurangi manajemen laba.

3) Bagi Regulator Pasar Modal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis pada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan terjadinya manajemen laba.